BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sebuah negara terdapat kewenangan pemerintahan yang berfungsi sebagai suatu kesatuan organisasi dimana pemerintah daerah atau pemerintah pusat mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Kewenangan ini berbentuk sebagai otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi wewenang dan tanggungjawab besar dalam mengelola keuangan serta mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Wewenang dan tanggung jawab besar yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan kemandirian dan kedewasaan untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing tanpa campur tangan dari pemerintah pusat lagi (Junery M. F, 2020).

Kewenangan pemerintah daerah (PEMDA) saat ini sangatlah besar dalam mengelola kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini merupakan akibat dari terbitnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tidak luput pula, di Provinsi Jambi, otonomi daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi yang berisi tentang

otonomi daerah dan pemerintah daerah. Hal ini menjadikan Provinsi Jambi memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya yang mencakup mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam (Bappeda Jambi, 2023)

Berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur keuangan secara otonom, seiring dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah, muncul fenomena tentang bagaimana daerah tersebut mengelola sumber daya, anggaran, dan kebijakan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah terutama dalam bidang keuangan yang secara efektif, perkembangan keuangan daerah di Indonesia sedang mengalami kemajuan sangat pesat (Putri, 2021). Disisi lain, (Kemendagri, 2023) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, adanya kemajuan dalam keuangan daerah maka selaras dengan perkembangan tata kelola pada keuangan daerah tersebut.

Mardiasmo (2019) mengatakan bahwa dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme

pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah (Auditya et al., 2020).

(Sugista, 2019) mengatakan bahwa Good Governance dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. *Good Governance* memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Dari semua indikator tersebut, hal yang paling penting dalam *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Mardiasmo (2019) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi antara lain *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency dan effectiveness, serta accountability*.

Konsep *Good Governance* atau tata kelola yang baik dapat terwujud apabila terdapat tanggung jawab (akuntabilitas), transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi Kinerja Keuangan Daerah yang bersangkutan. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang *participative*.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah merupakan hal penting. Bagaimana pemerintah daerah menyampaikan informasi kepada publik dan sejauh mana mereka bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja mereka. Hal ini menjadikan transparansi dan akuntabilitas adalah 2 hal yang harus diperhatikan dalam kewenangan Pemda dalam bidang keuangan (Suharyono, 2019)

Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas) (Nababan et al., 2021).

Disisi lain, pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan tolok ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik) atau berdasarkan basis regular dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi.

Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas publik (*public accountability*) pada era reformasi membawa dampak terhadap dalam proses pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi kajian yang marak dan *interchangable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis (Pratolo, 2021). Isu seputar transparansi dan akuntabilitas tidak terlepas dari maraknya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana oleh oknum pegawai maupun pejabat di pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas membutuhkan media agar bisa dikomunikasikan ke masyarakat secara lebih baik dan cepat (Bertot, Jaeger, & Grimes 2020). Hal ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola Kinerja Keuangan Daerah berupa akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam pengukuran kinerja organisasi atau instansi.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Hasthoro & Sunardi, 2021)

Prinsip Akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Sedangkan prinsip transparansi berarti semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Firmansyah & Rahmawati, 2020). Fenomena korupsi di dalam pemerintah daerah dapat sangat merugikan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Upaya untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan adalah bagian penting dari fenomena kinerja pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk menghindarinya adalah dengan menciptakan lingkungan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah dibuktikannya dengan dirilisnya laporan keuangan pemerintah Kota Jambi setiap akhir periode pencatatan. Berikut ditampilkan data pendapatan Kota Jambi Tahun 2019 hingga tahun 2022:

Tabel 1.1. Data Pendapatan Kota Jambi Tahun 2019 hingga 2022

Tahun	Jumlah Pendapatan	Kenaikan/Penurunan	Presentase
2019	393.429.595.383,99	-	-
2020	359.925.262.764,23	-33.504.332.619,76	-8,52%
2021	412.014.762.536,02	52.089.499.771,79	14,47%
2022	452.331.225.678	40.316.463.141,98	9,79%
2023	495.367.215.687,43	43.036.989.009,43	9,47%

Sumber: jambikota.go.id, 2024

Berdasarkan tabel 1,1. dapat dilihat bahwa Analisis data pendapatan Kota Jambi dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dimulai

dari penurunan tajam sebesar -8,52% pada tahun 2020, diikuti oleh pemulihan yang mengesankan dengan kenaikan pendapatan tahunan sebesar 14,47% pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan pertumbuhan stabil sebesar 9,79% pada tahun 2022 dan sedikit penurunan ke 9,47% pada tahun 2023. Pergerakan ini menggambarkan dinamika ekonomi daerah yang mampu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan, mencerminkan ketahanan ekonomi Kota Jambi dalam menghadapi perubahan kondisi. Peningkatan pendapatan Kota Jambi sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan pemanfaatan efektif otonomi daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan lokal melalui inovasi dan pengelolaan sumber daya secara mandiri. Hal ini mencerminkan bagaimana otonomi daerah dapat berkontribusi pada ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Jambi.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat mencerminkan kinerja mereka. Kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya adalah bagian dari evaluasi ini. Pemerintah daerah yang mengadopsi inovasi dan teknologi dalam administrasi publik mereka dapat meningkatkan efisiensi dan keterlayanan pelayanan publik. Ini mencakup penerapan e-government, sistem informasi geografis (SIG), dan teknologi lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan. Disisi lain, hal ini juga berkaitan dengan keterkaitan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah serta menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah daerah yang mendorong partisipasi masyarakat cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan membangun dukungan yang lebih besar dari warganya. Sehingga, hal ini dapat disimpulkan bahwa

tata kelola yang baik adalah tata kelola yang mengedepankan kepuasan masyarakat dalam pelaksanaannya (Haliah et al., 2023)

Kompetensi pegawai keuangan yang akuntabel dan transparan adalah aspek vital dalam memastikan integritas, ketelitian, dan keterbukaan informasi keuangan suatu organisasi. Pegawai keuangan yang memiliki kompetensi yang kuat dalam bidang ini tidak hanya memahami prinsip akuntansi yang mendasari tetapi juga mampu menerapkan standar etika yang tinggi dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan (N. D. Sari & Susanti, 2022).

Kompetensi pegawai memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja institusi keuangan. Ketika pegawai memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka, ini dapat menghasilkan peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan risiko yang lebih baik dalam institusi keuangan. Kemampuan teknis dalam bidang seperti analisis keuangan, manajemen risiko, pengelolaan investasi, dan pemahaman yang kuat terhadap peraturan keuangan memungkinkan pegawai untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan tepat waktu. Pegawai yang kompeten mampu menghadapi tantangan yang kompleks, melakukan analisis yang mendalam terhadap situasi keuangan, dan merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola dana dan risiko (Reinhardt & North, 2020)

Kompetensi pegawai memainkan peran penting dengan transparansi dan akuntabilitas. Ketika pegawai memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas mereka, hal ini mendukung transparansi dengan

memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada pemahaman yang kuat. Selain itu, kompetensi yang tinggi juga memperkuat akuntabilitas karena pegawai yang kompeten lebih cenderung bertanggung jawab atas tindakan mereka (Harits, 2019)

Dengan adanya hubungan tersebut menunjukkan jika kinerja pemerintah daerah dengan Kompetensi Pegawai bisa dikelola dengan baik apabila dilakukannya perencanaan serta sistem pengendalian yang baik dan memaksimalkan pengetahuan tentang akuntabilitas dan transparansi. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Natria et al., 2022) pada OPD di Depok, Jawa Barat yang menyimpulkan bahwa kinerja anggaran yang pegawainya berkompotensi membutuhkan keterlibatan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Pramudyawardhani & Munari, 2023) yang menyatakan bahwa tata kelola keuangan daerah berupa akuntabilitas dan transparansi mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui Kompetensi Pegawai.

Sementara itu penelitian (Ghanem & Castelli, 2019) di Kanada yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis Kompetensi Pegawai. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Demirag & Khadaroo, 2011) di UK dan penelitian (Natria et al., 2022) di Indonesia. Disisi lain, penelitian (Pramudyawardhani & Munari, 2023) pada penelitiannya di Surabaya yang menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi Pegawai pemerintah daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Indriasih & Sulistyowati, 2022) di Cirebon, Indonesia. Kemudian, penelitian (ke & Utami, 2020) di Indonesia yang menyatakan

bahwa Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Medan terutama Kinerja Keuangan Daerah. penelitian lain yang berkaitan dengan hal ini antaranya juga dilakukan oleh (Hardiningsih et al., 2020) di Indonesia serta (Ghanem & Castelli, 2019) di Kanada

Pemahaman terhadap fenomena-fenomena yang telah dipaparkan ini, diantaranya berupa tata kelola berbasis layanan masyarakat yang penuh akuntabilitas dan transparan. Serta disisi lain dapat menciptakan lingkungan Pemda yang bekerja secara jujur dengan kompetensi pegawai yang kapabel. Hal ini dianggap dapat membantu analisis dan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah agar dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengaruh antara tata kelola keuangan daerah berupa akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Disisi lain, terdapat juga pengaruh hubungan antara tata kelola keuangan daerah tersebut dengan kompetensi pegawai. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Jambi dengan Kompetensi Pegawai sebagai Variabel Mediasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kota Jambi?

2. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kompetensi Pegawai?
3. Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah kota jambi
4. Bagaimana Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kompetensi Pegawai?
5. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pemerintah Kota Jambi?
6. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh Kompetensi Pegawai?
7. Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah kota jambi yang dimediasi oleh Kompetensi Pegawai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kota Jambi;
2. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kompetensi Pegawai
3. Untuk mengetahui Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah kota jambi
4. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kompetensi Pegawai

5. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pemerintah Kota Jambi
6. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh Kompetensi Pegawai
7. Untuk mengetahui Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah kota jambi yang dimediasi oleh Kompetensi Pegawai

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis (Pengembangan Ilmu)

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam bidang manajemen keuangan, konsentrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis (Operasional)

Diharapkan secara praktis penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat menambah informasi bagi pihak yang terkait dalam penelitian. Sementara bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sumber dan tambahan informasi.